



1 Mengapa Pajak Penting bagi Kesejahteraan?

- Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara.
- Pajak menghubungkan kontribusi warga dengan manfaat publik.
- Pajak yang dikelola baik memperkuat pemerataan kesempatan.
- Pajak menopang pembangunan jangka panjang.

2 Dari Penerimaan ke Kesejahteraan



3 Bidang Utama yang Dibiayai Pajak



4 Indikator Kesejahteraan yang Dipengaruhi



5 Tantangan Indonesia

- Kepatuhan pajak belum merata.
- Basis pajak masih sempit.
- Ekonomi informal masih besar.
- Efektivitas belanja publik tidak selalu optimal.
- Kepercayaan publik bergantung pada transparansi dan akuntabilitas.

6 Arah Kebijakan

- 1 Perluas basis pajak secara adil.
- 2 Perkuat kepatuhan dan administrasi digital.
- 3 Lindungi kelompok rentan melalui belanja yang tepat sasaran.
- 4 Tingkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- 5 Pastikan penerimaan pajak kembali menjadi manfaat nyata.
- 6 Bangun kepercayaan melalui transparansi fiskal.

“Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi sarana menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.”



Pesan Utama

Semakin adil dan efektif sistem perpajakan, semakin besar kemampuan negara meningkatkan taraf hidup rakyat.



Pajak untuk Kesejahteraan: Dari Penerimaan Negara Menuju Peningkatan Taraf Hidup Rakyat

Artikel Akademik

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf

AI - Data analyst, IBM - ASMI

RudyCT Academic Series 2026

Bogor, Indonesia - 2026

Abstrak

Pajak pada hakikatnya bukan sekadar sumber penerimaan negara, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang memungkinkan negara mengubah kapasitas fiskal menjadi kesejahteraan nyata. Artikel ini membahas hubungan antara pemungutan pajak, kualitas belanja publik, redistribusi, pembangunan modal manusia, perlindungan sosial, pertumbuhan produktif, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Argumen utamanya adalah bahwa legitimasi sistem perpajakan tidak selesai ketika penerimaan masuk ke kas negara; legitimasi tersebut baru memperoleh makna substantif ketika pajak diterjemahkan menjadi pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang terjangkau, infrastruktur yang produktif, jaminan sosial yang dapat diandalkan, kesempatan kerja yang lebih baik, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, tantangannya mencakup basis pajak yang masih terbatas, besarnya sektor informal, ketimpangan kapasitas antardaerah, kualitas dan efektivitas belanja, kebutuhan transformasi administrasi digital, serta tuntutan agar kebijakan pajak tetap menjaga daya beli dan produktivitas. Data BPS terbaru menunjukkan bahwa pada Maret 2026 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen, sementara gini ratio tercatat 0,368. Perkembangan ini memperlihatkan kemajuan sekaligus mengingatkan bahwa pertumbuhan dan penerimaan fiskal harus terus dihubungkan dengan kualitas distribusi kesejahteraan. Artikel menawarkan kerangka 'tax-to-welfare chain' yang menempatkan keadilan pajak, kredibilitas anggaran, kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis hasil sebagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Pada akhirnya, pajak untuk kesejahteraan

menuntut kontrak sosial yang dapat dirasakan: warga membayar secara adil, negara mengelola secara transparan, dan masyarakat memperoleh manfaat publik yang meningkatkan kapabilitas serta taraf hidup secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pajak; kesejahteraan; kebijakan fiskal; redistribusi; belanja publik; kemiskinan; ketimpangan; modal manusia; keadilan pajak; Indonesia

1. Pendahuluan: Mengubah Cara Pandang tentang Pajak

Dalam perdebatan publik, pajak sering dipersepsikan terutama sebagai kewajiban yang mengurangi pendapatan rumah tangga atau laba perusahaan. Cara pandang ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Dalam negara modern, pajak adalah mekanisme kolektif untuk membiayai barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara memadai hanya melalui transaksi pasar. Sekolah negeri, rumah sakit publik, jalan, air bersih, keamanan, administrasi kependudukan, riset, mitigasi bencana, hingga perlindungan sosial memerlukan pembiayaan yang stabil dan dapat diprediksi. Karena itu, pertanyaan yang lebih substantif bukan hanya berapa besar pajak yang dipungut, melainkan untuk apa pajak digunakan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana kualitas penggunaannya, dan apakah manfaat tersebut benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat.

Gagasan 'pajak untuk kesejahteraan' menempatkan perpajakan sebagai bagian dari siklus kebijakan publik. Siklus itu dimulai dari pembentukan basis pajak, penetapan aturan dan tarif, pemungutan dan kepatuhan, masuknya penerimaan ke APBN dan APBD, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program, hingga munculnya hasil sosial-ekonomi. Bila salah satu mata rantai lemah, hubungan antara pajak dan kesejahteraan menjadi terputus. Penerimaan dapat meningkat tanpa disertai peningkatan kualitas layanan; sebaliknya, tuntutan belanja dapat meluas tanpa basis penerimaan yang memadai. Keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kualitas belanja menjadi inti pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif manajemen publik, pajak dapat dipahami sebagai input, sedangkan kesejahteraan merupakan outcome. Di antara keduanya terdapat proses konversi yang membutuhkan institusi, kompetensi birokrasi, pengadaan yang baik, tata kelola data, pengawasan, dan evaluasi. Karena itu, negara tidak cukup dinilai dari kemampuannya mengumpulkan pajak, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan public value. Public value tampak ketika warga memperoleh manfaat yang lebih besar daripada biaya sosial yang mereka tanggung, termasuk manfaat yang tidak selalu langsung terlihat seperti stabilitas makroekonomi, kepastian hukum, kualitas lingkungan, atau kesiapsiagaan menghadapi krisis.

Indonesia memiliki konteks yang khas: penduduk besar, wilayah kepulauan, ketimpangan antardaerah, variasi kapasitas pemerintah daerah, sektor informal yang luas, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dan modal manusia yang masih besar. Oleh sebab itu, desain pajak dan desain belanja harus dilihat sebagai satu kesatuan. Pajak yang adil tetapi dibelanjakan secara buruk akan kehilangan legitimasi. Belanja yang bermutu tetapi dibiayai secara tidak berkelanjutan akan menimbulkan tekanan fiskal. Artikel ini berangkat dari premis bahwa kesejahteraan lahir dari

kombinasi penerimaan yang cukup, distribusi beban yang adil, kualitas belanja, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

2. Pajak sebagai Kontrak Sosial dan Fondasi Negara Kesejahteraan

Secara normatif, pajak merepresentasikan kontrak sosial antara warga dan negara. Warga menyerahkan sebagian daya beli kepada pemerintah dengan harapan bahwa sumber daya tersebut akan dikelola untuk tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Kontrak ini tidak bersifat transaksi satu lawan satu. Seorang warga mungkin membayar pajak lebih besar daripada manfaat layanan yang ia terima secara langsung, sementara warga lain menerima layanan publik lebih besar daripada kontribusi fiskalnya. Justru di sinilah fungsi solidaritas sosial bekerja: kapasitas membayar yang berbeda dipertemukan dengan hak dasar dan kebutuhan publik yang relatif universal.

Negara kesejahteraan modern dibangun melalui tiga fungsi fiskal klasik: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi membiayai barang publik serta memperbaiki kegagalan pasar. Fungsi distribusi menggunakan pajak dan belanja untuk mengurangi ketimpangan kesempatan dan melindungi kelompok rentan. Fungsi stabilisasi menjaga perekonomian agar tidak terlalu bergejolak melalui kebijakan anggaran yang bersifat countercyclical. Ketiganya saling terkait. Pendidikan yang dibiayai pajak bukan hanya layanan sosial, tetapi investasi produktivitas. Jaminan kesehatan bukan sekadar transfer, tetapi perlindungan terhadap risiko kemiskinan akibat penyakit. Infrastruktur bukan hanya belanja fisik, tetapi pengurang biaya transaksi yang memungkinkan investasi dan mobilitas ekonomi.

Kontrak sosial akan kuat bila masyarakat melihat adanya fairness in contribution dan fairness in return. Fairness in contribution berarti beban pajak dibagi menurut kemampuan dan aktivitas ekonomi secara wajar. Fairness in return berarti penerimaan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang relevan, berkualitas, dan dapat diakses. Bila warga merasakan bahwa orang atau perusahaan tertentu dapat menghindari pajak sementara kelompok lain mudah dipungut, rasa keadilan menurun. Demikian pula, bila pajak meningkat tetapi korupsi, pemborosan, atau layanan buruk tetap terjadi, dukungan terhadap kepatuhan dapat melemah.

Karena itu, kepatuhan sukarela bukan semata hasil penegakan hukum. Ia juga dibentuk oleh tax morale, yaitu keyakinan moral dan sosial bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang sah dan berguna. Tax morale tumbuh dari kepercayaan terhadap institusi, persepsi keadilan, kemudahan administrasi, dan pengalaman nyata berinteraksi dengan negara. Pemerintah yang ingin memperkuat basis penerimaan perlu memperhatikan dimensi psikologis dan institusional ini. Warga yang merasa diperlakukan hormat, transparan, dan adil cenderung lebih menerima kewajiban pajak dibanding warga yang melihat pajak hanya sebagai beban tanpa imbal balik sosial.

3. Dari Tax Collection ke Tax-to-Welfare Chain

Untuk memahami bagaimana pajak meningkatkan taraf hidup, diperlukan kerangka yang menghubungkan proses fiskal dari hulu ke hilir. Artikel ini menyebutnya tax-to-welfare chain. Mata

rantai pertama adalah desain basis pajak: siapa dan aktivitas apa yang masuk ke dalam sistem. Mata rantai kedua adalah pemungutan yang efisien dan berkeadilan. Mata rantai ketiga adalah kredibilitas penerimaan dan penganggaran. Mata rantai keempat adalah alokasi ke program publik. Mata rantai kelima adalah kapasitas implementasi. Mata rantai keenam adalah hasil antara seperti akses sekolah, cakupan kesehatan, konektivitas, air bersih, dan perlindungan pendapatan. Mata rantai terakhir adalah outcome berupa produktivitas, mobilitas sosial, penurunan kemiskinan, kesehatan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup.

Kerangka ini penting karena peningkatan penerimaan tidak otomatis identik dengan peningkatan kesejahteraan. Dua negara dengan tax ratio yang sama dapat menghasilkan kualitas layanan publik yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat berasal dari tata kelola, struktur belanja, efisiensi pengadaan, kapasitas birokrasi, kualitas data penerima manfaat, atau kemampuan pemerintah mengukur hasil. Bahkan program dengan niat redistributif dapat gagal bila salah sasaran, biaya administrasinya tinggi, atau desain insentifnya lemah. Karena itu, reformasi pajak perlu berjalan paralel dengan reformasi belanja.

Dalam manajemen kinerja, setiap mata rantai seharusnya memiliki indikator. Pada sisi penerimaan dapat digunakan rasio kepatuhan, biaya pemungutan, coverage basis pajak, dan tax gap. Pada sisi belanja dapat diukur ketepatan sasaran, unit cost, waktu pelayanan, kualitas output, dan outcome sosial. Pada tingkat makro dapat dipantau kemiskinan, gini ratio, indeks pembangunan manusia, produktivitas tenaga kerja, dan mobilitas antargenerasi. Integrasi indikator memungkinkan pemerintah menilai bukan hanya 'berapa uang terkumpul' atau 'berapa anggaran terserap', tetapi 'apa perubahan yang dihasilkan'.

Pendekatan ini menggeser orientasi dari spending to outcomes. Belanja yang 100 persen terserap belum tentu efektif jika mutu layanannya rendah. Sebaliknya, program dengan serapan lebih rendah bisa saja menghasilkan dampak besar bila desainnya tepat. Oleh sebab itu, hubungan pajak-kesejahteraan harus ditopang budaya evaluasi, termasuk penggunaan eksperimen kebijakan, evaluasi dampak, analitik data, benchmarking antardaerah, serta keterbukaan hasil kepada publik. Dengan cara ini, pajak menjadi instrumen pembelajaran institusional, bukan sekadar mekanisme pendanaan.

4. Keadilan Pajak: Siapa Membayar dan Seberapa Besar?

Pajak untuk kesejahteraan harus dimulai dari pembagian beban yang dianggap wajar. Prinsip ability-to-pay menyatakan bahwa individu atau badan dengan kapasitas ekonomi lebih besar semestinya menanggung kontribusi yang lebih besar. Prinsip ini menjadi dasar progresivitas pajak penghasilan. Sementara itu, prinsip keadilan horizontal menuntut agar wajib pajak dengan kondisi ekonomi sebanding diperlakukan relatif setara. Keadilan vertikal menuntut perlakuan berbeda yang proporsional bagi kapasitas yang berbeda. Keduanya terdengar sederhana, tetapi implementasinya kompleks karena pendapatan dapat berasal dari gaji, usaha, capital gains, aset, warisan, atau aktivitas digital dengan karakter yang berbeda.

Keadilan pajak juga harus mempertimbangkan incidence, yaitu siapa yang pada akhirnya menanggung beban ekonomi. Pajak yang secara hukum dibayar perusahaan dapat sebagian dialihkan kepada konsumen melalui harga, pekerja melalui upah, atau pemegang saham melalui laba yang lebih rendah. Pajak konsumsi dapat tampak netral, tetapi proporsi beban terhadap pendapatan cenderung lebih tinggi pada rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi. Karena itu, desain PPN perlu dipadukan dengan perlindungan kebutuhan dasar, bantuan sosial yang efektif, dan struktur tarif yang tidak menciptakan distorsi berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, perubahan kebijakan PPN sejak 2025 menunjukkan pentingnya membedakan tarif statutori dan beban efektif. Untuk banyak barang dan jasa nonmewah, penggunaan dasar pengenaan pajak tertentu menghasilkan beban efektif sekitar 11 persen, sementara penerapan 12 persen efektif diarahkan pada kategori tertentu seperti barang mewah sesuai regulasi. Aspek teknis ini penting dikomunikasikan secara jelas karena persepsi publik terhadap pajak sangat sensitif terhadap informasi harga dan daya beli. Kebijakan yang secara teknis netral dapat dipersepsikan tidak adil bila komunikasi publik lemah.

Pada akhirnya, sistem pajak yang adil bukan berarti memaksimalkan tarif pada kelompok tertentu. Tarif yang terlalu tinggi dapat memperbesar insentif penghindaran, mendorong perubahan bentuk penghasilan, atau menurunkan investasi bila tidak dirancang dengan baik. Keadilan harus dibangun bersama efisiensi dan kemudahan administrasi. Basis yang luas, tarif yang wajar, pengecualian yang terbatas dan terarah, serta penegakan yang konsisten sering kali lebih berkelanjutan dibanding tarif tinggi dengan banyak celah.

5. Belanja Publik sebagai Jembatan antara Pajak dan Taraf Hidup

Pajak baru menjadi kesejahteraan ketika diterjemahkan menjadi belanja publik yang menghasilkan manfaat. Komposisi belanja sama pentingnya dengan volumenya. Belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, riset, dan konektivitas dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat. Sebaliknya, belanja yang dominan pada biaya rutin tanpa peningkatan mutu layanan dapat memperlemah dampak kesejahteraan. Pertanyaan utama bukan sekadar apakah anggaran 'pro-rakyat', melainkan apakah satu rupiah anggaran menghasilkan layanan yang lebih baik dan peluang ekonomi yang lebih luas.

Belanja pendidikan memperlihatkan hubungan jangka panjang antara pajak dan kesejahteraan. Pembiayaan sekolah, guru, pelatihan, beasiswa, laboratorium, dan konektivitas digital memengaruhi kualitas modal manusia. Namun anggaran pendidikan tidak otomatis menghasilkan pembelajaran. Outcome bergantung pada kualitas guru, tata kelola sekolah, kurikulum, kepemimpinan, evaluasi, dan lingkungan keluarga. Karena itu, kebijakan fiskal harus dihubungkan dengan reformasi sektor. Peningkatan anggaran tanpa perbaikan institusi dapat menghasilkan diminishing returns.

Pada sektor kesehatan, pajak dapat membiayai layanan primer, imunisasi, rumah sakit, tenaga kesehatan, serta subsidi bagi peserta yang tidak mampu. Nilai kesejahtraannya jauh melampaui

manfaat medis langsung. Rumah tangga yang terlindungi dari biaya kesehatan katastrofik memiliki risiko jatuh miskin yang lebih kecil. Anak yang sehat memiliki peluang belajar lebih baik. Pekerja yang sehat lebih produktif. Dengan demikian, belanja kesehatan memiliki efek redistributif sekaligus produktif.

Infrastruktur juga memiliki dimensi kesejahteraan yang kuat. Jalan desa, transportasi publik, listrik, internet, air bersih, irigasi, dan sanitasi mengurangi biaya transaksi serta membuka akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun proyek infrastruktur perlu dinilai dengan life-cycle cost, dampak lingkungan, pemeliharaan, dan distribusi manfaat. Infrastruktur yang megah tetapi kurang digunakan dapat menjadi beban fiskal; infrastruktur sederhana yang tepat sasaran dapat menghasilkan manfaat sosial tinggi. Pajak untuk kesejahteraan menuntut disiplin memilih proyek berdasarkan nilai sosial, bukan hanya visibilitas politik.

6. Pajak, Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial

Salah satu ukuran paling nyata dari keberhasilan kebijakan fiskal adalah kemampuannya mengurangi kerentanan dan kemiskinan. Pada Maret 2026, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini lebih rendah dibanding September 2025. Namun jumlah absolut tersebut tetap besar dan memperlihatkan bahwa perlindungan sosial masih memiliki peran penting. Selain rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, terdapat kelompok rentan yang posisinya hanya sedikit di atas garis tersebut dan dapat kembali miskin akibat kehilangan pekerjaan, penyakit, bencana, atau kenaikan harga pangan.

Pajak mendukung perlindungan sosial melalui dua jalur. Pertama, penerimaan membiayai transfer tunai, subsidi terarah, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Kedua, sistem pajak sendiri dapat dirancang agar tidak memperberat kelompok rentan, misalnya melalui pembebasan atau perlakuan khusus bagi kebutuhan dasar serta struktur PPh yang progresif. Dalam kerangka fiscal incidence, dampak kesejahteraan harus dihitung secara neto: berapa pajak yang dibayar rumah tangga dan berapa manfaat tunai maupun in-kind yang diterima.

Efektivitas perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data. Kesalahan inklusi menyebabkan bantuan diterima oleh pihak yang kurang berhak, sedangkan kesalahan eksklusi membuat rumah tangga rentan tidak terlindungi. Transformasi menuju basis data sosial-ekonomi yang lebih terintegrasi memungkinkan program disesuaikan secara lebih dinamis. Namun integrasi data harus disertai tata kelola privasi, mekanisme koreksi, transparansi kriteria, dan kanal pengaduan. Teknologi tidak menggantikan akuntabilitas; ia hanya memperkuatnya bila institusi bekerja baik.

Tujuan akhir perlindungan sosial bukan mempertahankan ketergantungan, melainkan membangun ketahanan dan mobilitas. Karena itu, bantuan konsumsi perlu dihubungkan dengan investasi kapabilitas: kesehatan ibu-anak, pendidikan, pelatihan, akses kerja, inklusi keuangan, dan dukungan usaha produktif. Pajak dengan demikian membiayai 'jembatan' dari kerentanan menuju kemandirian.

7. Pajak, Ketimpangan, dan Mobilitas Sosial

Ketimpangan tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan, tetapi juga perbedaan akses terhadap pendidikan bermutu, kesehatan, jaringan ekonomi, perumahan layak, teknologi, dan keamanan sosial. BPS melaporkan gini ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, naik dibanding September 2025 sebesar 0,363 tetapi lebih rendah dibanding Maret 2025 sebesar 0,375. Pergerakan ini mengingatkan bahwa ketimpangan bersifat dinamis. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan tanpa secara otomatis memperbaiki distribusi relatif, terutama bila pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor, wilayah, atau kelompok dengan produktivitas tinggi.

Sistem fiskal memengaruhi ketimpangan melalui pajak dan belanja. Pajak progresif dapat mengurangi konsentrasi pendapatan setelah pajak. Belanja pendidikan dan kesehatan dapat memperbaiki distribusi kesempatan. Infrastruktur publik mengurangi ketimpangan spasial bila diarahkan pada wilayah tertinggal. Perlindungan sosial mengurangi ketimpangan konsumsi. Dampak redistributif terbesar sering kali berasal dari sisi belanja, terutama layanan publik in-kind, bukan dari tarif pajak semata.

Mobilitas sosial menjadi indikator penting karena masyarakat dapat menerima adanya perbedaan pendapatan bila peluang untuk maju dianggap terbuka. Pajak dapat membiayai kondisi yang memungkinkan mobilitas: sekolah berkualitas, beasiswa, transportasi, internet, kesehatan, dan lingkungan usaha. Dengan kata lain, tujuan keadilan bukan menjadikan semua orang memiliki hasil yang sama, tetapi memperkecil pengaruh latar belakang keluarga terhadap peluang masa depan. Anak dari rumah tangga miskin seharusnya tetap memiliki kesempatan realistis untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang lebih baik.

Dalam jangka panjang, redistribusi yang mendukung kapabilitas lebih berkelanjutan daripada redistribusi yang hanya memindahkan pendapatan. Transfer tetap dibutuhkan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi investasi pada human capital memperbesar produktivitas dan basis pajak di masa depan. Inilah lingkaran kebajikan fiskal: pajak membiayai kapabilitas, kapabilitas meningkatkan produktivitas, produktivitas memperluas basis pajak, dan basis pajak yang lebih kuat membiayai layanan yang lebih baik.

8. Pajak dan Pertumbuhan: Menghindari Dikotomi Kesejahteraan versus Produktivitas

Perdebatan pajak sering diposisikan sebagai pilihan antara keadilan dan pertumbuhan. Pajak yang lebih tinggi dianggap mengurangi insentif, sedangkan pajak yang rendah dianggap mendorong investasi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut lebih kompleks. Pajak memang dapat memengaruhi keputusan bekerja, menabung, berinvestasi, dan memilih lokasi usaha. Namun penerimaan pajak juga membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, stabilitas, dan kepastian institusional yang dibutuhkan dunia usaha. Pertanyaan yang tepat bukan apakah pajak 'baik' atau 'buruk' bagi pertumbuhan, melainkan kombinasi desain pajak dan kualitas belanja seperti apa yang memaksimalkan kesejahteraan jangka panjang.

Pajak yang buruk adalah pajak yang menciptakan distorsi besar, tidak pasti, sulit dipatuhi, mudah dihindari, atau menimbulkan biaya administrasi tinggi. Sebaliknya, pajak yang baik memiliki basis luas, aturan relatif sederhana, perlakuan konsisten, dan kepastian hukum. Pada sisi belanja, pengeluaran yang meningkatkan produktivitas dapat mengompensasi sebagian biaya ekonomi dari pemungutan pajak. Jalan yang lebih baik, energi andal, pekerja sehat, dan tenaga kerja terampil menurunkan biaya bisnis dan memperluas pasar.

Dalam konteks Indonesia, tantangan penting adalah memperluas basis pajak tanpa menghambat formalitas usaha. UMKM dan pekerja informal perlu masuk ke ekosistem formal secara bertahap melalui administrasi yang sederhana, insentif transisi, akses pembiayaan, dan manfaat nyata dari formalitas. Jika formalisasi hanya dipersepsikan sebagai pintu menuju beban pajak, resistensi akan tinggi. Bila formalitas memberi akses kredit, perlindungan sosial, pasar pemerintah, dan kepastian usaha, kepatuhan menjadi lebih rasional.

Kebijakan pajak juga perlu stabil dan dapat diprediksi. Perusahaan membuat keputusan investasi jangka panjang berdasarkan ekspektasi. Perubahan aturan yang terlalu sering atau interpretasi yang tidak konsisten meningkatkan risk premium. Karena itu, reformasi pajak pro-kesejahteraan harus sekaligus pro-kepastian, pro-produktivitas, dan pro-keadilan.

9. Pemerataan Antarwilayah dan Peran Fiskal Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan perbedaan besar dalam kepadatan penduduk, kapasitas ekonomi, sumber daya alam, dan kemampuan administratif daerah. Karena itu, pajak untuk kesejahteraan tidak dapat hanya dianalisis pada tingkat nasional. Transfer ke daerah, pajak daerah, dan kualitas APBD menentukan apakah warga di wilayah berbeda memperoleh standar layanan dasar yang layak. Desentralisasi fiskal memberi ruang adaptasi lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan koordinasi, ketimpangan kapasitas, serta variasi kualitas belanja.

Prinsip equalization penting agar daerah dengan basis pajak rendah tetap mampu membiayai layanan publik minimum. Tanpa mekanisme ini, kualitas sekolah atau layanan kesehatan akan terlalu bergantung pada kekayaan lokal. Namun transfer fiskal perlu dirancang agar tidak mengurangi insentif daerah meningkatkan pendapatan sendiri atau efisiensi belanja. Formula transfer sebaiknya memperhitungkan kebutuhan, kapasitas fiskal, kondisi geografis, dan kinerja, dengan transparansi yang memungkinkan publik memahami dasar distribusinya.

Pajak daerah seperti pajak properti, pajak kendaraan, dan pungutan tertentu dapat memperkuat akuntabilitas lokal karena warga lebih mudah melihat hubungan antara pembayaran dan layanan di lingkungan mereka. Akan tetapi, pajak daerah harus menjaga iklim usaha dan tidak menciptakan fragmentasi pasar domestik. Harmonisasi regulasi penting agar desentralisasi tidak berubah menjadi biaya transaksi yang berlebihan.

Kesejahteraan antarwilayah juga memerlukan investasi pada konektivitas dan layanan digital. Telemedicine, pembelajaran digital, administrasi daring, dan pembayaran elektronik dapat menurunkan biaya jarak, tetapi hanya jika tersedia infrastruktur telekomunikasi dan literasi digital.

Dengan demikian, pajak nasional dan daerah harus bersinergi dalam membangun akses, bukan saling tumpang tindih.

10. Digitalisasi Perpajakan dan Pelayanan Publik

Transformasi digital membuka peluang memperbaiki seluruh rantai pajak-kesejahteraan. Pada sisi penerimaan, integrasi data dapat membantu identifikasi basis pajak, mengurangi kesalahan, mempercepat layanan, dan mendeteksi risiko ketidakpatuhan. Pada sisi belanja, data digital dapat memperbaiki penargetan bantuan, pengadaan, monitoring proyek, dan evaluasi hasil. Namun digitalisasi bukan sekadar mengganti formulir kertas menjadi formulir elektronik. Ia memerlukan redesign proses, interoperabilitas, kualitas data, keamanan siber, serta kompetensi pegawai.

Administrasi pajak yang modern seharusnya bergerak menuju *compliance by design*: sistem membuat kepatuhan lebih mudah daripada ketidakpatuhan. Pre-filled return, integrasi data transaksi, pembayaran otomatis, risk-based audit, dan layanan digital dapat menurunkan compliance cost. Hal ini penting terutama bagi usaha kecil yang sering tidak memiliki staf pajak profesional. Jika administrasi terlalu rumit, biaya kepatuhan dapat menjadi pajak tersembunyi yang regresif.

Artificial intelligence dan analitik data dapat digunakan untuk mendeteksi pola risiko, memprioritaskan pemeriksaan, mengidentifikasi anomali, dan memprediksi kebutuhan layanan. Namun penggunaan AI dalam pajak harus mematuhi prinsip *responsible AI*: transparansi, auditabilitas, keamanan, perlindungan data, human oversight, serta mekanisme banding. Keputusan yang berdampak pada hak wajib pajak tidak boleh menjadi 'black box'. Akurasi statistik tidak menggantikan *due process*.

Di sisi kesejahteraan, integrasi data fiskal dan sosial memungkinkan evaluasi lebih baik mengenai siapa membayar dan siapa menerima manfaat. Dengan data yang aman dan teranonimisasi, pemerintah dapat melakukan fiscal incidence analysis secara lebih rutin. Hal ini akan memperkuat kebijakan berbasis bukti dan mengurangi debat yang hanya bertumpu pada persepsi.

11. Kepercayaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pajak adalah salah satu titik pertemuan paling sensitif antara warga dan negara. Warga menyerahkan sumber daya secara wajib; karena itu tuntutan transparansi sangat tinggi. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun dengan publikasi angka penerimaan, tetapi dengan penjelasan bagaimana uang digunakan, apa hasil program, berapa biaya per unit layanan, dan bagaimana pemerintah menangani penyimpangan. Transparansi yang bermakna harus dapat dipahami, bukan hanya tersedia dalam dokumen teknis.

Anggaran warga, dashboard kinerja, laporan proyek, data pengadaan, dan hasil audit dapat membantu membangun fiscal literacy. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua penerimaan dapat dilacak ke satu program tertentu karena anggaran bersifat *pooled*. Namun

pemerintah tetap dapat menjelaskan hubungan agregat: berapa proporsi belanja untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, bunga utang, dan administrasi. Penjelasan tersebut membantu warga menilai trade-off.

Akuntabilitas juga membutuhkan mekanisme koreksi. Audit, pengawasan legislatif, lembaga pemeriksa, sistem pengaduan, whistleblowing, dan penegakan antikorupsi melindungi integritas pajak. Satu kasus penyalahgunaan dapat memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada nilai nominal kerugiannya karena merusak persepsi fairness. Oleh sebab itu, pengendalian internal dan integritas pejabat pajak maupun pengelola anggaran adalah aset fiskal.

Kepercayaan tidak berarti warga harus selalu setuju dengan kebijakan. Demokrasi fiskal justru menerima adanya perbedaan preferensi mengenai tarif, subsidi, atau prioritas belanja. Yang penting adalah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, informasinya terbuka, dan keputusan mengikuti aturan.

12. Mengukur Apakah Pajak Benar-Benar Meningkatkan Kesejahteraan

Kebijakan pajak dan belanja sering dievaluasi melalui indikator input: penerimaan, pagu, dan serapan. Untuk menilai kesejahteraan, indikator harus bergerak ke outcome. Pada pendidikan, outcome dapat berupa literasi, numerasi, kelulusan, dan transisi kerja. Pada kesehatan, outcome mencakup usia harapan hidup, mortalitas ibu-anak, prevalensi penyakit, dan perlindungan finansial. Pada perlindungan sosial, ukuran yang relevan adalah pengurangan poverty gap, ketahanan terhadap shock, dan keberhasilan keluar dari kemiskinan. Pada infrastruktur, indikator mencakup waktu tempuh, biaya logistik, konektivitas, dan produktivitas wilayah.

Fiscal incidence analysis merupakan alat penting untuk melihat dampak distribusi. Analisis ini menghitung pajak langsung, pajak tidak langsung, transfer tunai, subsidi, serta manfaat layanan publik menurut kelompok pendapatan. Hasilnya dapat menunjukkan apakah sistem fiskal secara keseluruhan progresif atau regresif. Pendekatan ini lebih informatif daripada melihat satu jenis pajak secara terpisah.

Evaluasi dampak juga perlu membandingkan program dengan counterfactual: apa yang akan terjadi bila program tidak ada. Metode eksperimen terkontrol, quasi-experiment, difference-in-differences, regression discontinuity, dan matching dapat membantu. Tidak semua kebijakan memungkinkan eksperimen, tetapi prinsip kausalitas tetap penting agar pemerintah tidak mengklaim semua perubahan sebagai hasil program.

Pada tingkat strategis, balanced scorecard sektor publik dapat menghubungkan perspektif fiskal, proses internal, pembelajaran organisasi, dan manfaat warga. Indikator keuangan tetap penting, tetapi tidak menjadi tujuan akhir. Dengan kerangka ini, pajak dilihat sebagai sumber daya untuk menciptakan hasil sosial yang terukur.

13. Risiko Kebijakan: Ketika Pajak Tidak Sampai Menjadi Kesejahteraan

Hubungan antara pajak dan kesejahteraan dapat gagal pada beberapa titik. Pertama, basis pajak sempit menyebabkan negara tidak memiliki ruang fiskal memadai. Kedua, desain pajak yang tidak adil dapat menurunkan kepatuhan dan legitimasi. Ketiga, penerimaan yang volatil membuat program publik sulit dipertahankan. Keempat, belanja dapat salah sasaran atau bocor. Kelima, kapasitas implementasi rendah menyebabkan program tidak menghasilkan output bermutu. Keenam, hasil program dapat tidak merata karena perbedaan akses geografis, gender, disabilitas, atau status sosial.

Risiko lain adalah fiscal illusion, ketika masyarakat menuntut belanja tetapi tidak melihat biaya pembiayaannya. Pemerintah dapat menutup kesenjangan sementara dengan utang, tetapi utang tetap merupakan klaim terhadap penerimaan masa depan. Utang produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi jika digunakan untuk investasi bernilai tinggi, namun utang untuk membiayai pengeluaran tidak efektif memindahkan beban ke generasi berikutnya. Karena itu, pajak untuk kesejahteraan juga membutuhkan disiplin fiskal antargenerasi.

Subsidi universal merupakan contoh trade-off. Subsidi harga dapat mudah dipahami dan cepat dirasakan, tetapi sering kali manfaat nominal lebih besar dinikmati kelompok yang mengonsumsi lebih banyak. Transfer terarah dapat lebih progresif, namun membutuhkan data dan administrasi yang baik. Pilihan kebijakan harus mempertimbangkan konteks, biaya transisi, dan risiko politik.

Risiko reformasi juga mencakup reform fatigue. Perubahan sistem yang terlalu cepat tanpa dukungan pengguna dapat menimbulkan gangguan layanan dan resistensi. Transformasi pajak digital atau penataan subsidi perlu disertai pilot, komunikasi, dukungan teknis, serta evaluasi berkelanjutan.

14. Agenda Reformasi Indonesia: Dari Revenue Mobilization ke Welfare Maximization

Agenda fiskal Indonesia ke depan sebaiknya bergerak dari paradigma revenue mobilization semata menuju welfare maximization. Penerimaan tetap penting karena tanpa ruang fiskal negara tidak dapat menyediakan layanan publik. Namun target penerimaan perlu dihubungkan dengan target kesejahteraan. Reformasi basis pajak harus mempertimbangkan distribusi beban, biaya kepatuhan, dampak pada investasi, dan integrasi ekonomi digital. Pada saat yang sama, belanja harus semakin berbasis bukti dan hasil.

Pertama, perluasan basis pajak sebaiknya dilakukan dengan mengurangi celah, meningkatkan kepatuhan, dan memanfaatkan data, bukan hanya menaikkan tarif. Kedua, perlindungan kelompok rentan harus melekat pada desain kebijakan, terutama ketika perubahan pajak memengaruhi harga konsumsi. Ketiga, tax expenditure seperti insentif dan pengecualian perlu dievaluasi secara berkala: siapa penerimanya, berapa biaya fiskalnya, dan apakah manfaat ekonominya sebanding. Keempat, administrasi pajak perlu semakin sederhana, digital, dan berorientasi layanan.

Kelima, kualitas belanja harus ditempatkan setara dengan kualitas penerimaan. Spending review, performance-based budgeting, procurement analytics, dan evaluasi program perlu diperkuat. Keenam, transfer ke daerah harus mendorong pemerataan sekaligus kinerja. Ketujuh, transparansi fiskal harus ditingkatkan dalam bahasa yang dapat dipahami publik. Kedelapan, agenda antikorupsi dan integritas merupakan bagian inheren dari reformasi pajak karena kepercayaan menentukan kepatuhan.

Pada level sosial, pemerintah perlu mengkomunikasikan bahwa pajak bukan harga untuk membeli layanan pribadi, melainkan kontribusi terhadap sistem yang memungkinkan masyarakat hidup lebih aman, sehat, terdidik, dan produktif. Narasi ini hanya kredibel bila manfaatnya nyata.

15. Implikasi bagi Manajemen, Bisnis, dan Kepemimpinan

Topik pajak untuk kesejahteraan memiliki implikasi langsung bagi ilmu manajemen. Bagi perusahaan, pajak bukan sekadar fungsi compliance, tetapi bagian dari tata kelola dan legitimasi korporasi. Praktik tax planning yang agresif mungkin legal pada batas tertentu, tetapi dapat menimbulkan risiko reputasi bila bertentangan dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Konsep responsible tax mendorong perusahaan menilai dampak sosial strategi pajak, transparansi, dan konsistensi dengan ESG.

Bagi manajer publik, tantangan utamanya adalah mengubah anggaran menjadi public value. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup strategic planning, data analytics, procurement, risk management, performance management, dan stakeholder engagement. Pengelolaan pajak dan belanja tidak dapat dilakukan dalam silo. Kementerian keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga statistik, auditor, dan penyedia layanan perlu berbagi data serta tujuan hasil.

Bagi pemimpin, kebijakan fiskal memerlukan kemampuan menjelaskan trade-off. Menurunkan pajak dapat meningkatkan disposable income tetapi mengurangi ruang belanja. Menambah subsidi dapat membantu jangka pendek tetapi mengurangi dana investasi. Menaikkan belanja pendidikan bermanfaat jika kualitas implementasi meningkat. Kepemimpinan fiskal yang matang tidak menjanjikan semua hal sekaligus; ia menetapkan prioritas dan menjelaskan konsekuensi.

Bagi pendidikan manajemen, pajak sebaiknya diajarkan tidak hanya sebagai teknik akuntansi atau regulasi, tetapi sebagai sistem institusional yang berhubungan dengan strategi, ekonomi politik, etika, data, dan kebijakan sosial. Generasi manajer masa depan perlu memahami bahwa keberhasilan bisnis bergantung pada kualitas ekosistem publik yang sebagian besar dibiayai pajak.

16. Perspektif Masa Depan: AI, Ekonomi Digital, dan Kontrak Fiskal Baru

Ekonomi digital mengubah objek pajak, model bisnis, lokasi penciptaan nilai, dan administrasi. Perusahaan dapat melayani konsumen lintas batas tanpa kehadiran fisik yang besar. Aset tak berwujud dan data menjadi sumber nilai. Pekerjaan platform dan gig economy menantang kategori tradisional pekerja versus pengusaha. Sistem pajak harus beradaptasi agar basis tidak tergerus dan persaingan tetap adil.

AI memperbesar kapasitas administrasi tetapi juga meningkatkan tuntutan tata kelola. Analitik prediktif dapat membantu memperkirakan penerimaan, memetakan risiko, dan menargetkan pemeriksaan. Natural language processing dapat meningkatkan layanan wajib pajak. Namun bias data, false positives, dan ketidakjelasan algoritma dapat merugikan warga. Prinsip proportionality harus diterapkan: tingkat otomatisasi harus sesuai dengan dampak keputusan terhadap hak individu.

Dalam jangka panjang, kontrak fiskal juga akan dipengaruhi perubahan demografi, transisi energi, perubahan iklim, dan otomasi. Penuaan penduduk meningkatkan kebutuhan kesehatan dan pensiun. Transisi energi dapat mengurangi penerimaan dari sektor fosil tetapi membuka basis baru melalui ekonomi hijau. Perubahan iklim meningkatkan kebutuhan belanja adaptasi dan penanggulangan bencana. Otomasi dapat mengubah distribusi pendapatan antara tenaga kerja dan modal. Semua ini menuntut sistem pajak yang adaptif.

Fondasi yang tetap sama adalah legitimasi. Teknologi dapat mengubah cara pajak dipungut, tetapi tidak menghapus pertanyaan moral: siapa membayar, siapa menerima manfaat, dan bagaimana keputusan dibuat.

17. Kesimpulan

Pajak untuk kesejahteraan berarti memandang perpajakan sebagai bagian dari proses penciptaan kualitas hidup, bukan sekadar pengumpulan penerimaan. Pajak menyediakan kapasitas fiskal; kapasitas fiskal membiayai layanan dan perlindungan; layanan publik membangun kapabilitas; kapabilitas meningkatkan produktivitas dan mobilitas; dan masyarakat yang lebih produktif memperluas kembali basis pajak. Rantai kebajikan ini hanya bekerja apabila beban dibagi secara adil, administrasi efisien, belanja berkualitas, dan institusi dipercaya.

Dalam konteks Indonesia, penurunan kemiskinan hingga 8,07 persen pada Maret 2026 menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat sekitar 22,93 juta penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran dengan gini ratio 0,368. Angka-angka tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan fiskal tidak dapat diukur hanya dari penerimaan atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah warga memperoleh peluang hidup yang lebih baik, perlindungan terhadap risiko, layanan publik yang bermutu, dan kesempatan mobilitas sosial.

Agenda ke depan membutuhkan keseimbangan antara perluasan basis pajak dan perlindungan daya beli, antara progresivitas dan produktivitas, antara kebutuhan belanja dan disiplin fiskal, serta antara digitalisasi dan perlindungan hak. Reformasi pajak tanpa reformasi belanja tidak cukup; reformasi belanja tanpa penerimaan yang berkelanjutan juga rapuh. Keduanya harus dipersatukan dalam tata kelola berbasis hasil.

Pesan akhirnya sederhana: warga akan lebih mudah melihat pajak sebagai kontribusi terhadap kemajuan bersama ketika hubungan antara pembayaran dan manfaat publik menjadi nyata. Negara yang mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab akan memperoleh bukan hanya penerimaan, tetapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal

sosial yang memungkinkan sistem fiskal bekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

18. Sintesis: Membangun Sistem Fiskal yang Terasa Manfaatnya oleh Warga

Sistem fiskal yang berorientasi kesejahteraan perlu mampu menjawab pertanyaan sederhana yang diajukan warga: apa hubungan antara pajak yang saya bayarkan dan kualitas hidup yang saya rasakan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak harus berupa hubungan langsung satu rupiah pajak dengan satu layanan tertentu. Dalam anggaran modern, penerimaan dikumpulkan bersama dan dialokasikan berdasarkan prioritas publik. Namun secara agregat warga harus dapat melihat perubahan: sekolah lebih baik, puskesmas lebih responsif, transportasi lebih aman, jalan lebih terpelihara, bantuan lebih tepat sasaran, dan administrasi lebih mudah. Ketika perubahan tersebut konsisten, pajak memperoleh makna sebagai kontribusi sosial, bukan hanya kewajiban hukum.

Untuk mencapai keadaan itu, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Banyak masalah kebijakan muncul karena setiap tahap bekerja dalam logika yang berbeda. Perencanaan menghasilkan daftar prioritas yang luas, penganggaran membagi sumber daya menurut struktur organisasi, pelaksanaan mengejar serapan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah program berakhir tanpa mekanisme kuat untuk memperbaiki desain tahun berikutnya. Pendekatan outcome-based budgeting menuntut setiap program memiliki theory of change yang eksplisit: input apa yang digunakan, aktivitas apa yang dilakukan, output apa yang dihasilkan, outcome apa yang dituju, dan asumsi apa yang harus dipenuhi.

Pajak untuk kesejahteraan juga memerlukan konsistensi antarwaktu. Program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur memiliki horizon panjang. Perubahan prioritas yang terlalu cepat dapat menimbulkan sunk cost dan fragmentasi. Sebaliknya, program yang terus dilanjutkan tanpa evaluasi dapat menjadi rutinitas anggaran. Karena itu, kesinambungan harus dibedakan dari inerti. Program yang efektif perlu dipertahankan dan diperbaiki; program yang tidak efektif perlu dihentikan atau didesain ulang meskipun secara politik populer.

Pada tingkat rumah tangga, dampak fiskal selalu bersifat gabungan. Sebuah keluarga mungkin membayar PPN ketika berbelanja, membayar PPh bila penghasilannya memenuhi ketentuan, menerima subsidi pendidikan, menggunakan fasilitas kesehatan, menikmati jalan dan keamanan, serta mungkin menerima transfer sosial. Karena itu, keadilan tidak dapat dinilai dari satu transaksi. Pemerintah sebaiknya semakin mampu menyajikan fiscal benefit statement secara agregat atau simulatif yang menunjukkan bagaimana kelompok pendapatan berbeda terkena pajak dan memperoleh manfaat. Transparansi semacam ini dapat memperkaya diskusi publik.

Keterlibatan masyarakat juga penting. Partisipasi bukan berarti setiap keputusan anggaran ditentukan melalui voting publik, tetapi preferensi dan pengalaman pengguna harus menjadi input. Survei kepuasan, musyawarah perencanaan, citizen report card, open data, dan kanal pengaduan dapat membantu mendeteksi masalah yang tidak terlihat dari laporan administratif. Data serapan dapat menunjukkan bahwa program selesai, tetapi pengguna dapat menunjukkan bahwa

kualitasnya rendah. Dengan menggabungkan data administratif dan pengalaman warga, pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Akhirnya, pajak untuk kesejahteraan menuntut kesadaran bahwa kualitas institusi adalah pengungkit utama. Sistem pajak yang sama dapat menghasilkan hasil berbeda di bawah institusi yang berbeda. Kompetensi pegawai, independensi pengawasan, budaya integritas, keterbukaan data, kepastian hukum, dan kapasitas belajar organisasi menentukan seberapa efektif penerimaan diubah menjadi kesejahteraan. Reformasi fiskal karena itu bukan proyek teknis satu kementerian, melainkan agenda kelembagaan nasional.

Salah satu bidang yang sering luput dari perhatian publik adalah tax expenditure, yaitu penerimaan yang secara sengaja tidak dipungut karena adanya pembebasan, pengurangan, tarif khusus, atau insentif. Secara ekonomi, tax expenditure memiliki karakter mirip belanja karena pemerintah mengorbankan penerimaan untuk mencapai tujuan tertentu. Insentif dapat berguna untuk mendorong investasi, riset, energi bersih, atau kegiatan yang memiliki spillover positif. Namun setiap insentif memiliki opportunity cost. Satu rupiah penerimaan yang hilang karena fasilitas pajak adalah satu rupiah yang tidak tersedia untuk pendidikan, kesehatan, atau pengurangan defisit. Karena itu, tax expenditure harus dievaluasi seperti program belanja: tujuan harus jelas, penerima harus teridentifikasi, biaya fiskal harus dihitung, dan dampaknya harus diukur. Insentif yang tidak efektif sebaiknya dihentikan, sementara insentif yang terbukti menghasilkan manfaat sosial tinggi dapat dipertahankan. Transparansi tax expenditure juga mengurangi risiko fasilitas pajak berubah menjadi privilege permanen bagi kelompok tertentu.

Dimensi lain adalah kualitas belanja modal manusia. Pendidikan dan kesehatan sering dipandang sebagai belanja sosial, padahal keduanya merupakan investasi ekonomi jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi baik, pendidikan bermutu, dan kesehatan yang memadai akan memasuki pasar kerja dengan produktivitas lebih tinggi. Produktivitas meningkatkan upah, memperbesar konsumsi formal, dan pada akhirnya memperluas basis pajak. Dengan demikian, terdapat feedback loop positif antara belanja sosial dan penerimaan masa depan. Perspektif ini penting ketika pemerintah menghadapi tekanan untuk memangkas belanja yang manfaatnya baru terlihat setelah bertahun-tahun. Fiscal discipline tidak seharusnya berarti mengorbankan investasi manusia; disiplin yang baik justru membedakan belanja konsumtif berulang dari investasi yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Pengukuran social rate of return dapat membantu menilai program mana yang layak diprioritaskan.

Jaminan sosial memperlihatkan fungsi pajak sebagai instrumen berbagi risiko. Risiko sakit, pengangguran, disabilitas, usia tua, dan bencana tidak tersebar merata serta sulit ditanggung sendiri oleh setiap rumah tangga. Sistem jaminan sosial mengumpulkan kontribusi dan pajak untuk membentuk risk pool yang lebih besar. Semakin luas pool, semakin kecil volatilitas yang harus ditanggung individu. Secara ekonomi, perlindungan risiko dapat mendorong keberanian mengambil keputusan produktif: pekerja lebih bersedia berpindah pekerjaan, keluarga lebih berani menyekolahkan anak lebih lama, dan pelaku usaha lebih berani berinvestasi bila risiko dasar terlindungi. Dengan demikian, perlindungan sosial bukan lawan dari dinamika pasar; dalam desain

yang baik, ia menjadi fondasi agar pasar tenaga kerja dan kewirausahaan berfungsi lebih fleksibel tanpa menimbulkan kerentanan berlebihan.

Pajak untuk kesejahteraan juga perlu mempertimbangkan gender. Beban pajak yang tampak netral dapat memiliki dampak berbeda pada perempuan dan laki-laki karena perbedaan partisipasi kerja, pola konsumsi, tanggung jawab pengasuhan, kepemilikan aset, dan akses terhadap layanan. Belanja untuk penitipan anak, kesehatan reproduksi, transportasi aman, air bersih, dan perlindungan sosial dapat mengurangi unpaid care burden dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Analisis gender-responsive budgeting membantu memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Dalam konteks ini, kesejahteraan bukan hanya kenaikan pendapatan rata-rata, tetapi juga perluasan pilihan hidup dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menempati posisi strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi jalur mobilitas ekonomi. Pendekatan pajak terhadap UMKM harus mempertimbangkan kemampuan administrasi dan tahap perkembangan usaha. Sistem yang terlalu kompleks dapat mendorong informalitas, sedangkan pembebasan tanpa batas dapat menciptakan cliff effect ketika usaha enggan tumbuh karena takut memasuki rezim pajak yang lebih berat. Desain transisi yang bertahap, sederhana, dan berbasis omzet atau indikator yang mudah diverifikasi dapat mengurangi masalah tersebut. Lebih penting lagi, formalisasi perlu disertai manfaat: akses kredit, perlindungan sosial, pengadaan pemerintah, pelatihan, dan layanan digital. Ketika manfaat formalitas terlihat, pajak menjadi bagian dari paket pembangunan usaha, bukan sekadar biaya tambahan.

Dalam bidang ketahanan pangan, pajak dan belanja bertemu secara langsung dengan kesejahteraan rumah tangga miskin karena proporsi pengeluaran untuk makanan sangat besar. Kebijakan fiskal dapat mendukung irigasi, riset pertanian, jalan produksi, gudang, informasi harga, dan perlindungan petani. Namun subsidi input yang tidak tepat sasaran dapat menciptakan pemborosan atau distorsi. Pendekatan yang lebih efektif adalah mengidentifikasi bottleneck produktivitas dan risiko yang dihadapi petani, lalu memilih instrumen yang sesuai. Pajak atas konsumsi kebutuhan pokok juga harus dinilai melalui dampak distribusi. Perlindungan daya beli pangan sering lebih efektif bila dikombinasikan dengan bantuan terarah dan kebijakan pasokan, bukan hanya manipulasi tarif secara permanen.

Transisi energi dan perubahan iklim akan semakin memengaruhi kontrak fiskal. Pajak karbon, cukai energi, atau pengurangan subsidi bahan bakar dapat memperbaiki sinyal harga dan mengurangi emisi, tetapi dampaknya terhadap rumah tangga berpendapatan rendah harus dikelola. Sebagian penerimaan dapat didaur ulang dalam bentuk transfer, transportasi publik, subsidi energi bersih, atau investasi adaptasi. Pendekatan revenue recycling memungkinkan kebijakan lingkungan sekaligus menjaga keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi biaya besar akibat banjir, kekeringan, kebakaran, kenaikan muka laut, dan cuaca ekstrem. Pajak untuk kesejahteraan masa depan harus membiayai resilience, karena kegagalan beradaptasi akan menimbulkan kerugian fiskal dan sosial yang jauh lebih besar.

Perubahan demografi menambah tantangan. Ketika proporsi penduduk usia lanjut meningkat, kebutuhan kesehatan, perawatan jangka panjang, dan pensiun juga naik. Pada saat yang sama, basis pekerja yang membayar pajak dapat tumbuh lebih lambat. Negara perlu merencanakan pembiayaan antargenerasi sejak dini. Kebijakan yang meningkatkan partisipasi kerja, produktivitas, tabungan pensiun, dan kesehatan preventif dapat mengurangi tekanan. Demografi juga berhubungan dengan pendidikan anak usia dini dan kualitas generasi muda. Investasi pada fase awal kehidupan sering memiliki return sosial sangat tinggi karena memengaruhi kemampuan belajar dan kesehatan sepanjang hidup. Pajak memungkinkan pembiayaan lintas generasi: generasi produktif hari ini membiayai layanan yang membentuk generasi produktif berikutnya.

Kesejahteraan juga dipengaruhi kualitas lingkungan hidup. Pajak dan instrumen fiskal dapat menginternalisasi externalities ketika kegiatan ekonomi menimbulkan biaya kepada masyarakat yang tidak tercermin dalam harga pasar. Pungutan atas polusi, sampah, atau penggunaan sumber daya dapat mendorong perilaku yang lebih efisien, tetapi harus dirancang dengan mekanisme yang dapat dipantau. Penerimaannya dapat digunakan untuk rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, ruang hijau, air bersih, dan mitigasi bencana. Dengan demikian, konsep pajak untuk kesejahteraan meluas dari pendapatan dan konsumsi menuju kualitas udara, air, iklim, dan ruang hidup. Taraf hidup yang tinggi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang sehat.

Dari sisi pembiayaan negara, pengelolaan utang merupakan pasangan penting perpajakan. Pajak membiayai kebutuhan saat ini, sedangkan utang memungkinkan sebagian biaya dialihkan ke masa depan. Pengalihan tersebut masuk akal bila utang membiayai aset atau investasi yang juga dinikmati generasi mendatang. Namun jika utang digunakan untuk belanja yang tidak menghasilkan manfaat berkelanjutan, generasi masa depan akan menerima kewajiban tanpa aset yang sepadan. Analisis debt sustainability karena itu harus disatukan dengan analisis kualitas belanja. Rasio utang yang sama dapat memiliki makna berbeda tergantung apakah dana digunakan untuk infrastruktur produktif, pendidikan, atau pengeluaran yang cepat habis. Pajak untuk kesejahteraan memerlukan intergenerational fairness, bukan hanya keseimbangan tahunan.

Komunikasi fiskal adalah aspek manajerial yang sering diremehkan. Kebijakan pajak menyentuh pendapatan dan harga, sehingga mudah memicu reaksi emosional. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya isi aturan, tetapi alasan, distribusi dampak, perlindungan yang tersedia, dan manfaat jangka panjang. Komunikasi yang terlalu teknis dapat menimbulkan kebingungan, sementara slogan yang terlalu sederhana dapat mengurangi kredibilitas. Praktik terbaik adalah menyediakan beberapa lapisan informasi: ringkasan yang mudah dipahami, simulasi dampak, dokumen teknis, dan data terbuka. Komunikasi juga harus dua arah melalui konsultasi dan mekanisme umpan balik. Ketika masyarakat memahami trade-off, perdebatan dapat bergeser dari kecurigaan menuju pilihan kebijakan yang lebih rasional.

Pada sektor kesehatan, pendekatan value-based public spending dapat membantu memprioritaskan intervensi. Tidak semua teknologi medis memiliki cost-effectiveness yang sama. Pajak yang terbatas harus dialokasikan pada program yang memberi health gain terbesar per unit biaya, sambil tetap mempertimbangkan keadilan akses. Pencegahan penyakit, imunisasi, kesehatan ibu-anak, dan pelayanan primer sering memiliki return sosial tinggi. Namun pembiayaan penyakit

katastropik juga penting untuk perlindungan finansial. Kombinasi antara cost-effectiveness dan equity menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih transparan. Prinsip serupa dapat diterapkan di pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial: bukan sekadar memilih program termurah, tetapi program yang menghasilkan nilai publik terbesar.

Di bidang pendidikan, pajak memungkinkan negara mengoreksi ketidaksetaraan awal yang berasal dari keluarga. Anak dari rumah tangga kaya dapat memperoleh buku, internet, bimbingan, dan sekolah berkualitas dari sumber daya keluarga; anak dari rumah tangga miskin tidak memiliki pilihan yang sama. Pendidikan publik yang berkualitas mengurangi ketergantungan hasil belajar pada kekayaan orang tua. Akan tetapi, pemerataan akses harus diikuti pemerataan mutu. Membangun sekolah tanpa guru berkualitas atau menyediakan perangkat digital tanpa dukungan pedagogi tidak cukup. Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus memperhatikan school leadership, teacher development, assessment, dan dukungan bagi siswa yang tertinggal. Pajak menjadi alat equalization of opportunity ketika digunakan untuk memperkecil kesenjangan kualitas, bukan hanya jumlah fasilitas.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan portfolio management. Pemerintah selalu memiliki lebih banyak usulan proyek daripada ruang fiskal. Pemilihan perlu mempertimbangkan net social benefit, readiness, distribusi manfaat, risiko konstruksi, biaya pemeliharaan, dan dampak lingkungan. Proyek yang memberikan manfaat tinggi bagi wilayah tertinggal dapat memiliki nilai sosial lebih besar meskipun financial return langsung lebih rendah. Sebaliknya, proyek dengan proyeksi permintaan berlebihan dapat menimbulkan contingent liabilities. Penggunaan public-private partnership dapat membantu pembiayaan, tetapi tidak menghilangkan risiko; kontrak yang buruk justru memindahkan risiko kepada negara. Pajak untuk kesejahteraan memerlukan disiplin proyek sejak tahap appraisal hingga operasi.

Kualitas aparatur merupakan variabel yang menghubungkan hampir semua tema. Administrasi pajak memerlukan analis data, auditor, ahli hukum, petugas layanan, dan spesialis teknologi. Belanja publik memerlukan perencana, pengadaan, insinyur, tenaga kesehatan, guru, dan evaluator. Investasi pada kompetensi aparatur dapat meningkatkan return atas seluruh anggaran. Reformasi organisasi juga perlu mengurangi silo dan mendorong kolaborasi lintas lembaga. Data pajak, data sosial, data usaha, dan data layanan harus dapat berbicara satu sama lain di bawah tata kelola yang sah. Tanpa integrasi institusional, digitalisasi hanya menghasilkan banyak sistem yang tidak interoperabel.

Keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan hasil. Wajib pajak yang tidak setuju dengan penetapan harus memiliki mekanisme keberatan dan banding yang jelas. Penerima bantuan yang dikeluarkan dari daftar harus dapat meminta koreksi. Pelaku usaha yang mengikuti pengadaan harus diperlakukan konsisten. Prosedur yang adil meningkatkan legitimasi bahkan ketika hasil tidak menguntungkan semua pihak. Dalam literatur perilaku, orang cenderung lebih menerima keputusan yang tidak mereka sukai bila prosesnya transparan, konsisten, dan memberi kesempatan untuk didengar. Karena itu, desain institusi fiskal harus memperhatikan due process, bukan hanya efisiensi administratif.

Secara makro, pajak dan belanja juga berfungsi sebagai automatic stabilizers. Ketika ekonomi melemah, penerimaan pajak cenderung turun dan sebagian belanja sosial meningkat, sehingga daya beli tidak jatuh sedalam tanpa intervensi. Ketika ekonomi menguat, penerimaan meningkat dan tekanan bantuan berkurang. Mekanisme ini membantu meredam siklus bisnis. Namun stabilisasi memerlukan ruang fiskal yang dibangun pada masa normal. Negara yang memasuki krisis dengan defisit tinggi dan basis pajak lemah memiliki pilihan lebih sempit. Oleh karena itu, mobilisasi penerimaan pada masa pertumbuhan merupakan bentuk asuransi makroekonomi untuk masa sulit.

Akhirnya, indikator kesejahteraan perlu lebih luas daripada pendapatan per kapita. Pendapatan penting, tetapi kualitas hidup juga dipengaruhi kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, waktu tempuh, kualitas pekerjaan, akses digital, dan rasa percaya kepada institusi. Evaluasi fiskal seharusnya menggunakan dashboard multidimensi. Sebuah kebijakan dapat menaikkan PDB tetapi memperburuk polusi atau ketimpangan; kebijakan lain mungkin tidak segera menaikkan PDB tetapi meningkatkan kesehatan dan produktivitas masa depan. Dengan kerangka multidimensi, pemerintah dapat menilai trade-off secara lebih jujur dan menghindari penyempitan kesejahteraan menjadi satu angka.

Aspek penting berikutnya adalah hubungan antara pajak dan kualitas pekerjaan. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh apakah seseorang bekerja, tetapi juga oleh stabilitas pekerjaan, tingkat upah, keselamatan, akses jaminan sosial, peluang peningkatan keterampilan, dan prospek karier. Penerimaan pajak dapat membiayai pelatihan vokasi, layanan penempatan kerja, sistem informasi pasar tenaga kerja, inspeksi keselamatan, dan dukungan transisi bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat membantu tenaga kerja bergerak dari pekerjaan berproduktivitas rendah menuju pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Dalam era AI dan otomasi, fungsi ini semakin penting karena perubahan teknologi dapat menciptakan pekerjaan baru sekaligus menghapus tugas-tugas lama. Negara perlu menggunakan pajak untuk membangun adaptive capacity, bukan sekadar kompensasi setelah disrupsi terjadi. Investasi reskilling yang baik menghubungkan kebutuhan industri, kurikulum, sertifikasi, dan data lowongan sehingga anggaran benar-benar meningkatkan employability.

Hubungan pajak dan perumahan juga perlu diperhatikan. Biaya tempat tinggal yang tinggi dapat mengurangi kesejahteraan meskipun pendapatan nominal meningkat. Kebijakan pajak properti, insentif pembangunan, pembiayaan perumahan, dan investasi transportasi publik memengaruhi harga tanah serta pola kota. Pajak properti yang dirancang baik dapat menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus mengurangi spekulasi tanah, tetapi penilaian aset harus akurat dan mekanisme perlindungan perlu tersedia bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki aset namun arus kas terbatas. Di sisi belanja, perumahan sosial, sanitasi, dan transportasi yang terhubung dapat memperluas akses ke pekerjaan. Kesejahteraan perkotaan karena itu membutuhkan koordinasi antara fiskal, tata ruang, dan kebijakan transportasi.

Pajak juga mendukung kapasitas inovasi nasional. Riset dasar, universitas, laboratorium publik, infrastruktur data, dan pendanaan inovasi memiliki karakter public good karena manfaatnya menyebar melampaui pihak yang membiayai. Tanpa dukungan publik, investasi riset cenderung lebih rendah daripada tingkat yang optimal secara sosial. Namun kebijakan fiskal untuk inovasi harus

selektif dan dievaluasi. Insentif R&D, hibah, atau dana ventura pemerintah harus memiliki mekanisme governance yang mencegah capture dan memastikan tambahan investasi, bukan sekadar subsidi terhadap kegiatan yang akan dilakukan perusahaan tanpa bantuan. Dalam jangka panjang, sistem inovasi yang kuat meningkatkan produktivitas dan basis pajak, sehingga menghasilkan siklus fiskal yang lebih sehat.

Kualitas layanan dasar di perdesaan memerlukan perhatian khusus karena biaya per pengguna sering lebih tinggi akibat jarak dan kepadatan rendah. Jika kebijakan hanya mengejar efisiensi biaya rata-rata, daerah terpencil dapat selalu kalah dalam prioritas. Di sinilah konsep equity-weighted evaluation relevan: manfaat bagi kelompok yang akses awalnya rendah dapat diberi bobot sosial lebih besar. Kebijakan pajak nasional memungkinkan pooling lintas wilayah sehingga warga di daerah dengan basis ekonomi kecil tetap memperoleh layanan. Prinsip ini merupakan salah satu alasan utama keberadaan pemerintah pusat dalam sistem fiskal federal atau desentralistik: redistribusi antardaerah tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada kapasitas lokal.

Sementara itu, tata kelola pengadaan menentukan seberapa jauh pajak berubah menjadi layanan nyata. Pengadaan publik bernilai besar dan rentan terhadap mark-up, kolusi, spesifikasi yang mengunci pemasok, keterlambatan, serta kualitas rendah. E-procurement, open contracting data, analitik harga, dan vendor performance management dapat meningkatkan value for money. Namun teknologi harus didukung kompetensi dan independensi. Pengadaan yang terlalu takut risiko juga dapat menjadi lambat dan menghambat layanan. Karena itu, governance yang baik bukan sekadar menambah kontrol, melainkan mendesain kontrol berbasis risiko sehingga perhatian difokuskan pada transaksi bernilai tinggi atau berisiko besar. Setiap penghematan pengadaan pada hakikatnya memperbesar kemampuan pajak membiayai kesejahteraan tanpa menaikkan tarif.

Dari perspektif etika, pajak mengandung prinsip timbal balik sosial. Individu memperoleh manfaat dari sistem hukum, infrastruktur, pendidikan tenaga kerja, kesehatan masyarakat, dan stabilitas yang memungkinkan aktivitas ekonomi. Karena itu, kewajiban pajak tidak hanya dapat dibenarkan sebagai perintah hukum, tetapi sebagai kontribusi terhadap institusi yang mendukung penciptaan kekayaan itu sendiri. Namun kewajiban moral warga seimbang dengan kewajiban moral negara untuk menggunakan dana secara hati-hati. Etika fiskal bersifat dua arah: tax compliance dan spending integrity. Masyarakat sulit diminta patuh bila negara mengabaikan integritas, sebagaimana negara sulit menyediakan layanan bila basis kepatuhan terlalu lemah.

Pajak sin dan cukai menunjukkan bagaimana instrumen fiskal dapat mengejar tujuan kesehatan sekaligus penerimaan. Cukai atas produk yang menimbulkan externalities kesehatan dapat mengurangi konsumsi melalui harga dan membiayai layanan kesehatan. Namun desain perlu memperhatikan elastisitas permintaan, potensi perdagangan ilegal, serta dampak distribusi. Penerimaan yang tinggi tidak boleh menjadi alasan mempertahankan konsumsi berbahaya; keberhasilan kebijakan justru dapat menurunkan basis penerimaan jika konsumsi turun. Karena itu, pemerintah perlu memandang cukai terutama sebagai instrumen korektif, bukan sumber penerimaan yang harus terus tumbuh tanpa batas.

Krisis seperti pandemi, bencana besar, atau gejolak harga energi menunjukkan pentingnya sistem fiskal yang responsif. Negara membutuhkan mekanisme rapid financing, data penerima yang mutakhir, dan kanal pembayaran yang dapat digunakan segera. Pengalaman krisis mengajarkan bahwa membangun sistem saat keadaan darurat jauh lebih mahal daripada menyiapkannya sebelumnya. Pajak pada masa normal membiayai kapasitas yang mungkin tampak tidak terpakai, seperti stok, sistem informasi, protokol darurat, atau cadangan fiskal. Namun kapasitas tersebut memiliki option value yang tinggi ketika krisis terjadi. Kesejahteraan mencakup bukan hanya kondisi rata-rata, tetapi kemampuan masyarakat bertahan saat terjadi shock.

Penting pula membedakan universalism dan targeting. Layanan seperti pendidikan dasar, kesehatan preventif, keamanan, dan infrastruktur sering memiliki alasan kuat untuk bersifat universal karena externalities dan hak dasar. Sebaliknya, transfer tunai mungkin lebih efisien bila ditargetkan pada kelompok rentan. Sistem fiskal yang baik menggabungkan keduanya. Universalism dapat memperkuat solidaritas dan mengurangi stigma, sedangkan targeting menghemat anggaran untuk manfaat yang sangat spesifik. Keputusan harus berdasarkan karakter layanan, biaya administrasi, risiko salah sasaran, dan tujuan sosial, bukan ideologi tunggal. Pajak untuk kesejahteraan adalah arsitektur campuran yang disesuaikan dengan konteks.

Pada akhirnya, reformasi fiskal memerlukan horizon politik yang cukup panjang. Manfaat investasi pendidikan, pencegahan kesehatan, adaptasi iklim, dan reformasi administrasi sering muncul setelah masa jabatan politik tertentu. Jika kebijakan hanya mengejar hasil cepat, program dengan return jangka panjang dapat terabaikan. Institusi perencanaan, aturan fiskal, evaluasi independen, dan publikasi indikator dapat membantu menjaga kesinambungan. Masyarakat akademik, media, dan organisasi sipil juga berperan memastikan diskusi pajak tidak berhenti pada tarif, tetapi menilai hubungan antara penerimaan, belanja, dan kesejahteraan antargenerasi.

Salah satu agenda yang semakin penting ialah mengembangkan tax literacy sebagai bagian dari literasi kewargaan. Banyak warga mengenal pajak hanya ketika membayar atau berhadapan dengan administrasi, padahal pemahaman mengenai APBN, fungsi redistribusi, subsidi, defisit, dan utang akan membantu masyarakat menilai kebijakan secara lebih rasional. Pendidikan fiskal dapat dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, media publik, dan layanan administrasi. Materinya tidak perlu berupa rumus perpajakan yang rumit, melainkan penjelasan mengenai mengapa pajak diperlukan, bagaimana anggaran disusun, apa hak wajib pajak, dan bagaimana warga dapat mengawasi penggunaan dana. Literasi yang lebih baik juga mengurangi ruang bagi misinformasi, misalnya anggapan bahwa semua kenaikan penerimaan pasti berasal dari kenaikan tarif, atau bahwa setiap rupiah pajak dapat langsung dikaitkan dengan layanan tertentu. Dalam demokrasi, kualitas pilihan fiskal bergantung pada kualitas informasi pemilih.

Dari sisi korporasi, kontribusi terhadap kesejahteraan tidak hanya melalui pajak penghasilan badan. Perusahaan juga berperan melalui pemotongan pajak karyawan, PPN, cukai tertentu, kepatuhan pemasok, dan kualitas informasi yang dilaporkan kepada otoritas. Karena itu, tata kelola pajak perusahaan perlu terintegrasi dengan enterprise risk management. Dewan direksi dan komisaris sebaiknya memahami bukan hanya risiko denda, tetapi juga risiko reputasi, perubahan regulasi, sengketa, dan konsistensi strategi pajak dengan tujuan keberlanjutan. Responsible tax

governance dapat mencakup kebijakan tertulis, transparansi yurisdiksi, pengendalian transfer pricing, serta larangan penggunaan struktur yang hanya bertujuan menciptakan hasil pajak tanpa substansi ekonomi. Pendekatan ini membantu memperkuat level playing field, sehingga perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh pesaing yang mengeksploitasi celah secara agresif.

Kualitas data harga dan pendapatan juga sangat menentukan kebijakan. Garis kemiskinan, indeks harga konsumen, upah, dan konsumsi rumah tangga digunakan untuk menilai daya beli dan menargetkan kebijakan. Jika data terlambat atau terlalu agregat, respons fiskal dapat salah arah. Pemanfaatan data transaksi digital, citra satelit, dan data administratif dapat memperkaya statistik resmi, tetapi metodologi harus transparan dan menjaga privasi. Integrasi data sebaiknya tidak menggantikan survei representatif; keduanya saling melengkapi. Big data sering memiliki volume besar tetapi bias cakupan, sedangkan survei memiliki desain representatif tetapi frekuensi terbatas. Kombinasi keduanya memungkinkan nowcasting kemiskinan, pemantauan harga lokal, dan evaluasi program yang lebih cepat. Bagi kebijakan pajak-kesejahteraan, kecepatan informasi sangat penting karena shock ekonomi dapat berubah dalam hitungan minggu.

Aspek behavioral economics juga relevan bagi kebijakan pajak. Kepatuhan dipengaruhi bukan hanya oleh tarif dan probabilitas pemeriksaan, tetapi juga oleh framing, norma sosial, kemudahan, dan pengalaman pengguna. Peningat yang sederhana, informasi yang jelas, dan proses pembayaran yang mudah dapat meningkatkan kepatuhan tanpa menambah sanksi. Sebaliknya, prosedur yang rumit menciptakan procrastination dan kesalahan. Namun nudges tidak boleh digunakan untuk mengaburkan hak atau memanipulasi warga. Desain perilaku harus meningkatkan kemampuan wajib pajak mengambil keputusan yang benar, misalnya dengan default yang memudahkan kepatuhan dan pesan yang menjelaskan penggunaan pajak. Pendekatan ini menggabungkan efisiensi administrasi dengan penghormatan terhadap otonomi warga.

Pemerintah juga perlu membangun kapasitas untuk melakukan scenario planning fiskal. Penerimaan pajak sensitif terhadap harga komoditas, pertumbuhan, nilai tukar, suku bunga, dan perubahan teknologi. Belanja pada saat yang sama dipengaruhi bencana, demografi, harga energi, serta tekanan sosial. Satu proyeksi dasar tidak cukup. Skenario optimistis, moderat, dan stres dapat membantu menentukan buffer dan prioritas. Dalam skenario penerimaan rendah, program apa yang harus dilindungi? Belanja mana yang dapat ditunda? Dalam skenario krisis, bagaimana bantuan dapat diperluas tanpa menciptakan kebocoran? Pertanyaan semacam ini membuat kebijakan lebih tangguh. Resilience fiskal adalah bagian dari kesejahteraan karena warga membutuhkan kepastian bahwa layanan dasar tetap tersedia ketika ekonomi terguncang.

Terakhir, pajak untuk kesejahteraan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kebijakan hari ini memengaruhi stok modal manusia, alam, fisik, dan institusional yang diwariskan kepada generasi mendatang. Penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam, misalnya, sebaiknya tidak seluruhnya diperlakukan sebagai pendapatan biasa; sebagian dapat diinvestasikan untuk diversifikasi ekonomi, pendidikan, dan pemulihan lingkungan. Dengan cara itu, aset alam yang berkurang diubah menjadi aset produktif lain. Prinsip ini sejalan dengan gagasan genuine saving dan intergenerational equity. Kesejahteraan fiskal bukan hanya memastikan

konsumsi hari ini, tetapi menjaga agar kapasitas masyarakat untuk hidup sejahtera tidak menurun di masa depan.

Dalam implementasi, pemerintah dapat menggunakan prinsip minimum service guarantee untuk memastikan bahwa warga memperoleh tingkat layanan dasar tertentu di mana pun mereka tinggal. Prinsip ini memberi orientasi yang lebih jelas bagi transfer fiskal dan pengukuran kinerja daerah. Jika target nasional hanya berupa rata-rata, kesenjangan ekstrem dapat tersembunyi. Standar minimum memaksa sistem melihat kelompok dan wilayah yang tertinggal. Namun standar harus realistis, terukur, dan disertai pembiayaan serta dukungan kapasitas. Daerah yang gagal karena sumber daya terbatas memerlukan bantuan teknis; daerah yang gagal karena tata kelola buruk memerlukan mekanisme akuntabilitas. Dengan demikian, pemerataan tidak berarti menyeragamkan semua kebijakan, tetapi menjamin fondasi layanan yang layak sambil memberi ruang inovasi lokal.

Peran perguruan tinggi dan komunitas riset juga strategis. Evaluasi independen dapat membantu pemerintah mengetahui apakah kebijakan benar-benar bekerja dan dapat membantu publik membedakan fakta dari klaim politik. Kerja sama antara universitas, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan policy lab, eksperimen lapangan, serta dashboard yang memantau outcome. Namun independensi ilmiah harus dijaga: pendanaan pemerintah tidak boleh menghalangi publikasi hasil yang kritis. Bagi mahasiswa manajemen, ekonomi, dan kebijakan publik, data fiskal merupakan laboratorium nyata untuk belajar tentang strategi, pengambilan keputusan, etika, dan analytics. Keterbukaan data akan memperluas ekosistem evaluasi dan menghasilkan ide perbaikan dari luar birokrasi.

Di tingkat global, kerja sama perpajakan semakin penting karena modal dan aktivitas digital mudah bergerak lintas batas. Penghindaran pajak internasional dapat mengurangi penerimaan negara dan memindahkan beban kepada basis yang kurang mobile seperti tenaga kerja dan konsumsi. Kerja sama pertukaran informasi, standar transfer pricing, dan kesepakatan mengenai perpajakan ekonomi digital bertujuan mengurangi race to the bottom. Bagi Indonesia, partisipasi aktif dalam tata kelola pajak internasional perlu diimbangi kapasitas domestik untuk mengimplementasikan aturan yang semakin kompleks. Keadilan pajak global pada akhirnya memengaruhi kapasitas negara berkembang membiayai kesejahteraan domestik.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa pajak adalah institusi pembangunan. Ia menghubungkan keputusan individual dengan tujuan kolektif, masa kini dengan masa depan, dan pertumbuhan dengan distribusi. Kinerja sistem tidak dapat dinilai dari satu indikator. Penerimaan yang tinggi tetapi layanan buruk bukan keberhasilan; layanan luas tetapi fiskal tidak berkelanjutan juga bukan keberhasilan. Ukuran yang lebih tepat adalah kemampuan sistem menjaga kecukupan penerimaan, keadilan beban, efisiensi ekonomi, kualitas layanan, perlindungan kelompok rentan, dan kepercayaan publik secara bersamaan. Inilah esensi perpajakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat.

19. Kerangka Implementasi: Lima Disiplin Menghubungkan Pajak dan Kesejahteraan

Agar gagasan pajak untuk kesejahteraan tidak berhenti pada slogan, pemerintah memerlukan disiplin implementasi. Disiplin pertama adalah menyatukan target penerimaan dengan target hasil sosial. Dalam penyusunan anggaran, tambahan penerimaan sebaiknya tidak hanya diterjemahkan sebagai ruang belanja, tetapi dikaitkan dengan prioritas yang memiliki indikator outcome yang jelas. Misalnya, peningkatan ruang fiskal untuk kesehatan harus dihubungkan dengan cakupan layanan primer, perlindungan finansial, dan perbaikan indikator kesehatan. Hubungan ini membuat masyarakat lebih mudah melihat logika penggunaan pajak serta membantu birokrasi menghindari fragmentasi program.

Disiplin kedua adalah melakukan spending review secara periodik. Program lama tidak boleh memperoleh anggaran hanya karena pernah ada pada tahun sebelumnya. Pemerintah perlu menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan kemungkinan duplikasi. Spending review yang baik bukan sekadar pemotongan, melainkan realokasi dari kegiatan berdaya guna rendah menuju kegiatan dengan manfaat sosial lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat terjadi bahkan tanpa kenaikan pajak, karena kualitas konversi anggaran menjadi layanan membaik. Prinsip ini sangat penting ketika ruang fiskal terbatas dan kebutuhan publik terus bertambah.

Disiplin ketiga adalah membangun feedback loop berbasis data. Informasi penerimaan, data program, indikator layanan, hasil survei rumah tangga, dan pengaduan warga harus terhubung dalam sistem evaluasi. Pemerintah perlu mengetahui tidak hanya siapa menerima manfaat, tetapi apakah manfaat tersebut mengubah perilaku dan kondisi hidup. Data harus dianalisis menurut wilayah, kelompok pendapatan, gender, usia, dan karakter lain yang relevan agar rata-rata nasional tidak menyembunyikan kelompok tertinggal. Feedback loop memungkinkan kebijakan diperbaiki lebih cepat daripada menunggu evaluasi lima tahunan.

Disiplin keempat adalah memperkuat transparansi mengenai trade-off. Tidak ada kebijakan fiskal tanpa biaya peluang. Ketika anggaran dialihkan ke satu program, program lain mungkin menerima lebih sedikit. Ketika insentif pajak diberikan, penerimaan berkurang. Ketika subsidi dipertahankan, ruang investasi dapat menyempit. Pemerintah yang menjelaskan trade-off secara terbuka membangun kedewasaan fiskal. Warga tidak selalu akan setuju, tetapi mereka memperoleh dasar untuk menilai apakah keputusan konsisten dengan tujuan kesejahteraan. Transparansi juga mengurangi kecenderungan kebijakan menjadi populis dalam jangka pendek tetapi mahal dalam jangka panjang.

Disiplin kelima adalah menjaga kesinambungan reformasi lintas pemerintahan. Administrasi pajak, kualitas pendidikan, reformasi kesehatan, dan pembangunan kapasitas daerah membutuhkan waktu panjang. Karena itu, kebijakan harus memiliki institutional memory, dokumentasi, indikator, dan mekanisme evaluasi yang dapat diwariskan. Perubahan politik tetap sah membawa prioritas baru, tetapi fondasi sistem tidak semestinya diulang dari nol. Kesinambungan yang adaptif memungkinkan Indonesia mengakumulasi pembelajaran dan meningkatkan return atas pajak dari tahun ke tahun. Inilah titik ketika pajak benar-benar menjadi institusi pembangunan:

bukan sekadar penerimaan tahunan, tetapi sumber daya kolektif yang dikelola secara belajar, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Glossarium

Istilah	Definisi
Ability-to-pay principle	Prinsip bahwa kontribusi pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.
Akuntabilitas fiskal	Kewajiban pemerintah menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan penerimaan serta belanja publik.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana keuangan tahunan pemerintah pusat.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Basis pajak	Pendapatan, konsumsi, aset, transaksi, atau objek lain yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Fiscal incidence	Analisis mengenai siapa yang secara ekonomi menanggung pajak dan siapa yang menerima manfaat belanja pemerintah.
Fiscal space	Ruang anggaran yang tersedia bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja atau merespons kebutuhan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
Gini ratio	Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; nilai lebih tinggi menunjukkan ketimpangan lebih besar.
Human capital	Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas produktif manusia.
Keadilan horizontal	Prinsip bahwa pihak dengan kondisi ekonomi setara seharusnya diperlakukan relatif setara dalam perpajakan.
Keadilan vertikal	Prinsip bahwa pihak dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat dikenai beban pajak yang berbeda secara proporsional.
Outcome	Perubahan atau manfaat akhir yang dihasilkan program, bukan hanya jumlah kegiatan atau anggaran yang terserap.

Pajak progresif	Struktur pajak di mana beban relatif meningkat sejalan dengan meningkatnya kemampuan membayar.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang dan jasa tertentu.
Public value	Nilai sosial yang diciptakan pemerintah melalui layanan, perlindungan, regulasi, dan institusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tax expenditure	Potensi penerimaan yang tidak dipungut akibat pengecualian, pengurangan, tarif khusus, atau insentif pajak.
Tax gap	Selisih antara pajak yang seharusnya dapat dipungut menurut aturan dan pajak yang benar-benar diterima.
Tax morale	Motivasi intrinsik dan norma sosial yang mendorong kepatuhan pajak.
Tax ratio	Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.
Tax-to-welfare chain	Kerangka yang menghubungkan desain pajak, pemungutan, penganggaran, belanja, layanan publik, dan outcome kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1976). The design of tax structure: Direct versus indirect taxation. *Journal of Public Economics*, 6(1-2), 55-75. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(76\)90041-4](https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90041-4)
- Badan Pusat Statistik. (2026, August 5). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, August 5). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. BPS-Statistics Indonesia.
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99-120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Chetty, R., Friedman, J. N., Saez, E., Turner, N., & Yagan, D. (2020). Income segregation and intergenerational mobility across colleges in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 135(3), 1567-1633. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa005>
- Deaton, A. (2003). Health, inequality, and economic development. *Journal of Economic Literature*, 41(1), 113-158. <https://doi.org/10.1257/002205103321544710>

- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Kleven, H. J. (2014). How can Scandinavians tax so much? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 77-98. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.77>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2), 175-208. <https://doi.org/10.2307/2296779>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- OECD. (2025). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2025*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/63b856d2-en>
- Piketty, T., & Saez, E. (2007). How progressive is the U.S. federal tax system? A historical and international perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 3-24. <https://doi.org/10.1257/jep.21.1.3>
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). Progressive wealth taxation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2019(2), 437-533. <https://doi.org/10.1353/eca.2019.0017>
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904-954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.
- World Bank. (2018). *The state of social safety nets 2018*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1254-5>